



## ***Gender Mainstreaming Plan International dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia***

### **INFO PENULIS**

Esmeralda Putri Namora Batubara  
UPN Veteran Jakarta  
[nmrralda@gmail.com](mailto:nmrralda@gmail.com)  
+6282280875086

Shanti Darmastuti  
UPN Veteran Jakarta  
[shanti.darmastuti@upnvj.ac.id](mailto:shanti.darmastuti@upnvj.ac.id)  
+6281311392704

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 4, No. 2, Agustus 2024  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penuialisan Referensi:***

Batubara, E. P. N., & Darmastuti, S. (2024). *Gender Mainstreaming Plan International dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1003-1017.

### **Abstrak**

Perspektif feminisme dalam studi hubungan internasional telah memberikan alternatif metodologi untuk menganalisis konsep-konsep hubungan internasional. Pembatasan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki peran penting dalam struktur sosial-ekonomi merupakan tanda tanya yang masih mengakar bahkan hingga abad ini. Norma gender tradisional yang mengakar dalam sistem sosial-ekonomi berperan mengekang posisi perempuan untuk dapat memilih berkecimpung di sektor publik, termasuk pada bidang ketenagakerjaan. Kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan merupakan isu yang telah menjadi perhatian global, yang melibatkan upaya aktor negara maupun non-negara untuk berkontribusi dalam dinamikanya. Upaya aktor non negara, dalam hal ini NGO memiliki signifikansi yang hadir mengisi kekosongan pemerintah dalam menanggapi tantangan dalam dinamika kesetaraan gender. Plan International sebagai entitas NGO merupakan organisasi pembangunan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap anak perempuan. Komitmen Plan International termanifestasikan melalui Kampanye Girls Get Equal sebagai gerakan global inisiatif untuk mencapai kesetaraan gender. Demikian penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya Plan International dalam bidang ketenagakerjaan menggunakan perspektif feminisme liberal dan konsep *gender mainstreaming* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Plan International sebagai NGO menjadi kolaborator negara dalam yang berkontribusi dalam upaya *gender mainstreaming* bidang ketenagakerjaan di Indonesia melalui proyek Girls Take Over dalam kampanye Girls Get Equal.

**Kata Kunci:** Plan International, Kesetaraan Gender, Ketenagakerjaan

### Abstract

The feminist perspective in the study of international relations has provided an alternative methodology to analyze international relations concepts. Restrictions on space and opportunities for women to occupy important roles in the socio-economic structure are a question mark that is still entrenched even in this century. The traditional gender norms that are rooted in the socio-economic system play a role in restricting women from choosing to be involved in the public sector, including positions in the employment sector. Gender equality in the field of employment is an issue that has become a global concern, involving the efforts of state and non-state actors to contribute to its dynamics. In efforts to achieve gender equality in the employment field, the efforts of non-state actors, in this case NGOs, have significance in filling the government's absence in responding to the challenges posed by structural factors. Plan International as an NGO entity is a development and humanitarian organization that aims to provide children's rights and equality for girls. Plan International's commitment is manifested through the Girls Get Equal Campaign as a global movement initiative to achieve gender equality. Thus, this research aims to understand Plan International's efforts in the field of employment using a liberal feminist perspective and the concept of gender mainstreaming using descriptive qualitative research methods. The research results show that Plan International as an NGO is a state collaborator in contributing to gender mainstreaming of the employment sector in Indonesia through the Girls Take Over project in the Campaign of Girls Get Equal.

**Key Words:** Plan International, Gender Equality, Employment

### A. Pendahuluan

Perspektif gender dan feminisme kian menyemarakkan studi hubungan internasional dalam upaya mengisi kekosongan analisis dengan perspektif feminisme dari praktik tradisional hubungan internasional. Perdebatan dalam diskursus yang memandang bahwa kajian hubungan internasional tradisional sebagai ilmu yang tidak memiliki relativitas dengan konsep gender dan feminisme, dan tidak berdampak satu sama lain, menjadikan feminisme sebagai jawaban yang menunjukkan dimana konsep gender dan perempuan seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis hubungan internasional. Melalui pendekatan feminisme, studi hubungan internasional dikonstruksikan dengan pola yang lebih gender netral, sebagai pertimbangan untuk merefleksikan kembali konsep dasar disiplin hubungan internasional (Smith, 2018). Aliran feminisme secara mendasar memiliki komitmen normatif yang menuntut kekosongan gender dari teori dan praktik hubungan internasional, dan upaya mendasar dalam menentang marginalisasi dan opresi terhadap perempuan. Sehingga, perspektif feminisme dalam studi hubungan internasional menganalisis realitas fenomena hubungan internasional dalam kacamata kelompok yang termarginalkan, keadilan ekonomi dan politik, sampai ketidaksetaraan, yakni aspek krusial yang tersisihkan oleh teori-teori konvensional (Ackerly, Stern & True, 2006).

Feminisme sebagai ideologi menentang opresi terhadap kaum marginal dan meyakini bahwa perempuan berada dalam suatu sistem yang mendukung ketidakadilan pemenuhan hak dan kesempatan yang setara. John Stuart Mill dan Harriet Taylor sebagai feminis berhaluan liberal menganalisis bahwa inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan gender hanya dapat diraih jika terkonstruksi sistem yang dapat membuka kesempatan, pendidikan dan hak politik yang setara bagi perempuan (Gerson, 2002). Perempuan dalam hal ini terjebak didalam pembatasan nilai yang didasarkan pada kapasitasnya untuk memegang peranan esensial dalam urusan kenegaraan (Tickner, 1992). Berangkat dari prinsip rasionalitas, feminisme liberal memiliki stance yang tegas bahwa *"All persons have an essential interest in leading a life in accordance with their own conception of value"*. Sebagaimana fenomena ini dianalisis melalui sensitif gender dan feminisme, maka seharusnya laki-laki dan perempuan berada dalam ruang atau sistem yang memposisikan mereka dalam kesetaraan dan dilihat secara umum sebagai manusia, keduanya

memiliki kesamaan untuk mempunyai peluang dan kesempatan yang sama (Wolf, 1997). Sehingga, analisis feminisme liberal menggerakkan upaya reformasi sosial yang memastikan kesetaraan peluang dan kesempatan bagi perempuan yang didukung oleh kebijakan dan hukum yang berkeadilan gender (Shepherd, 2010).

Komitmen internasional dalam mengupayakan kesetaraan gender dapat ditarik dari tonggak pengesahan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 1979, bersamaan dengan kesadaran akan urgensi untuk memasukkan hak-hak perempuan menjadi bagian penting dari kajian hak asasi manusia. Indonesia sejak 1984 telah meratifikasi CEDAW yang tertuang dalam Undang-undang No.7 tahun 1984. Oleh karena itu, Indonesia tergabung dalam tanggung jawab untuk memastikan pencapaian kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi gender dalam segala bentuk. Hal ini juga terlihat melalui perencanaan pembangunan berkelanjutan Indonesia hingga tahun 2025 melalui Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 yang mendasarkan pembangunan dengan perspektif gender (BAPPENAS, 2021). Beragam kebijakan yang diinisiasi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan gender menggambarkan peningkatan kesadaran akan urgensi kesetaraan gender. Hal ini diimplementasikan dalam upaya pemerintah menegaskan kebijakan *gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. *Gender mainstreaming* dapat dipahami sebagai strategi, upaya, atau inisiatif untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Inisiatif *gender mainstreaming* dalam suatu program akan mengintegrasikan aspek gender dalam setiap proses, yang mencakup tahapan: *gender analysis, programme design, resource allocation, programme implementation, dan monitoring and evaluation* (UN Women, 2022).

Landasan hukum negara yang menandai kesadaran akan urgensi kesetaraan gender dan feminisme, belum sejalan dengan pencapaian keadilan kerja berbasis gender di Indonesia. Dalam bidang ketenagakerjaan, kesenjangan gender terlihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia, pada tahun 2021, kesenjangan proporsi antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja masih mencapai angka yang tinggi yakni 28,93% (BPS, 2023). Ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan tersebut juga tercermin dalam data Proporsi Perempuan yang Menduduki Posisi Manajerial Indonesia menurut BPS yang mengalami penurunan. Pada tahun 2020, proporsi perempuan dalam level manajerial mencapai angka 33.08% yang kemudian menurun pada tahun 2022 yang mencapai angka 32.2% (BPS, 2022). Permasalahan ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan merupakan problematika kompleks yang memberikan batasan dan hambatan dalam mengakses kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan. Hal ini menjadi krusial mengingat bahwa kesetaraan gender menjadi bagian penting dari pemenuhan HAM. Selain itu, komitmen terhadap kesetaraan gender memberikan kontribusi penting dalam pembangunan perekonomian. McKinsey Global Institute dalam riset nya yang berjudul *The Power of Parity* menyebutkan bahwa negara-negara di Asia memiliki peluang lebih dalam peningkatan ekonomi pada tahun 2025 hingga mencapai \$4.5 miliar dari GDP tahunannya dengan mengedepankan kesetaraan gender (McKinsey, 2018).

Upaya pemerataan kesempatan dan keadilan gender, membutuhkan pertimbangan akar rumput, agar sudut pandang advokasi bersifat inklusif. Sehingga peranan aktor non-negara seperti *Non Governmental Organizations (NGO)* menjadi penting untuk dapat menghadirkan ide-ide kritis dalam menghadirkan solusi yang sensitif gender. NGO dapat dipahami sebagai gabungan masyarakat sipil dalam kesatuan grup dalam mengadvokasikan suatu isu (Betsill & Corell, 2008). Relasi antara NGO dan negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk *positioning*, seperti *NGO in states*, NGO kolaborator, NGO oposisi, dan NGO substitusi. Kedudukan atau *positioning* antara negara dan NGO berkaitan dengan pendekatan yang digunakan NGO untuk mewujudkan objektifnya dalam suatu negara (Ahmed & Potter, 2006). Irmadillah (2022) menjelaskan bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan dalam aspek kemanusiaan, termasuk kesetaraan gender, NGOs memiliki posisi yang penting dengan fokusnya terhadap aspek non-tradisional, berorientasi pada keadilan, dan mempunyai visi yang berorientasi pada masyarakat. NGOs memiliki peranan penting karena dapat berpengaruh dalam membentuk norma, mempengaruhi kebijakan, dan praktik otoritas nasional dan internasional (Lewis, 2009).

Salah satu NGO yang telah bergerak sejak 1937 dalam bidang *humanitarian* dan *development* dengan pusat pada anak dan kesetaraan bagi anak perempuan adalah Plan International. Plan international di Indonesia bergerak sejak tahun 1969 dikenal dengan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia). Salah satu komitmen nyata Plan International dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan adalah melalui kampanye global yakni Girls Get Equal. Girls Get Equal sebagai gerakan global menargetkan peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam rangka pemenuhan hak anak perempuan untuk mendapat kesetaraan dan keadilan. Realitas ketidaksetaraan gender yang menghambat pembangunan dan pemberdayaan gender pada akhirnya menempatkan perempuan, terkhusus anak perempuan dalam posisi yang rentan (Plan International, 2017). Dilatar belakangi oleh kompleksitas dinamika pemenuhan kesetaraan gender di Indonesia, terutama dalam bidang ketenagakerjaan, penelitian ini akan menganalisis upaya dan kontribusi NGO dalam suatu negara. Penelitian ini menganalisis upaya NGO yakni Plan International bersama dengan Plan Indonesia melalui kampanye Girls Get Equal dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan terhadap anak perempuan dalam langkah meningkatkan kesetaraan gender. Penelitian ini menjadi penting untuk dianalisis dalam menghadirkan sudut pandang alternatif dalam memahami kompleksitas gender dan kontribusi peranan *non-state actor* dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya *gender mainstreaming* Plan International dalam bidang ketenagakerjaan.

## B. Metodologi

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, dimana untuk menganalisis rumusan masalah penelitian, dilakukan metode pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi dokumen. Proses wawancara dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer yang didapatkan dari tahapan wawancara kepada representasi dari Plan Indonesia, untuk digabungkan dengan data sekunder melalui agregasi data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui dokumen, jurnal, artikel, maupun laporan. Kemudian, data yang terkumpul melewati tahapan analisis yang dilakukan untuk memproses data dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dinamika Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia

Level partisipasi perempuan dalam bidang ketenagakerjaan memiliki perbedaan yang bervariasi di berbagai negara di dunia, hal ini merefleksikan perbedaan norma sosial, pembangunan ekonomi, pencapaian pendidikan, kestabilan politik, dan beragam faktor lainnya. Menurut The Global Gender Gap Report pada tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 99 dari negara-negara global dan peringkat 10 dari regional Asia Timur dan Pasifik dengan skor sebesar 686 (WEF, 2021). Dijelaskan melalui data tersebut, bahwa terdapat kemunduran signifikan dalam hal ketimpangan gender akibat pandemi Covid-19, yang menggambarkan kemunduran Indonesia dalam upayanya untuk mengatasi ketimpangan gender. Melalui bagian ini akan dielaborasi dinamika kesetaraan gender di Indonesia untuk menampilkan fenomena ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan, sebagai berikut:

#### a. Payung Hukum Kesetaraan Gender bidang Ketenagakerjaan

Dalam level internasional, kesetaraan gender menjadi salah satu aspek krusial dalam pemenuhan hak asasi manusia yang telah ditetapkan secara fundamental dalam piagam PBB.. UNGA pada tahun 1979 menyatakan urgensi dalam mengakui, menjaga dan mempertakankan hak perempuan beriringan dengan penetapan CEDAW. CEDAW menjadi salah satu penanda komitmen kesetaraan gender internasional yang membuka jalan bagi negara di dunia untuk turut meratifikasi kemudian mengimplementasikannya. Indonesia turut serta menjadi anggota dengan melakukan ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1948. Selain CEDAW, standar hukum internasional yang secara spesifik menargetkan pencapaian kesetaraan gender dalam lingkup ketenagakerjaan tercantum melalui konvensi ILO. Indonesia telah mengadopsi beberapa rekomendasi ILO yang berkaitan dengan

kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan, seperti (ILO, 2006): ILO Convention No. 87, ILO Convention No. 100, sampai ILO Conventon No.111.

Dalam memberikan pengaturan akan hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan demi mencapai kesetaraan, regulasi dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia diatur melalui beberapa kebijakan, seperti:

1. UU No.13 Tahun 2003, yang ditunjukkan melalui Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003,
2. No36 Tahun 2021 tentang pengupahan, yang mendukung tercapainya kesetaraan pemberian upah,
3. Kepmenaker No.224 Tahun 2003, yang menjadi landasan nasional terkait hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan,
4. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, yakni arahan agenda PUG (Pengarusutamaan Gender) bagi lembaga negara,
5. UU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 atau Omnibus Law,
6. UU No.12 Tahun 2022 atau UUTPKS dalam meminimalisir kondisi kerja yang tidak adil akibat kekerasan seksual dan pelecehan seksual di tempat kerja.

Kesetaraan gender menjadi aspek pertimbangan penting yang tercantum dalam standar hukum internasional dan ketentuan perundang-undangan nasional, namun hak pekerja perempuan masih belum terpenuhi. Peran negara sebagai regulator dapat disimpulkan belum berjalan efektif untuk melakukan implementasi ketentuan yang memayungi hak perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam bidang ketenagakerjaan. Beragam faktor mendasari inefisiensi kebijakan hukum baik internasional maupun nasional dalam mengatasi permasalahan ketidakadilan gender dalam bidang ketenagakerjaan (Maryam, 2012).

#### **b. Pendidikan**

Kesenjangan tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor produktivitas akan mengarah pada ketimpangan gender dalam akses pekerjaan yang layak (Mehrotra & Sinha, 2017). Pada dasarnya, aspek pendidikan menjadi modal penting yang akan mempengaruhi beragam aspek lainnya dalam bidang ketenagakerjaan seperti upah, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan pasar kerja yang dapat dilamar. Indonesia mengatur ketentuan kesetaraan akses pendidikan melalui UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1, yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses pendidikan 9 tahun. Namun, data yang diterbitkan oleh BPS Indonesia melalui Susenas memperlihatkan ketimpangan aksesibilitas dalam hal rentang, periode, atau lama mengakses pendidikan. Pada tahun 2021, laki-laki telah mengakses pendidikan dalam rentang atau lama waktu 9 tahun, sedangkan perempuan hanya mencapai 8 tahun (BPS, 2023).

#### **c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Kesetaraan proporsi TPAK dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk pemenuhan hak perempuan pekerja. Semakin tinggi TPAK perempuan akan menandakan peningkatan kesetaraan gender yang terbentuk (KPPPA, 2024). Partisipasi angkatan kerja perempuan selama 10 tahun kebelakang berada pada kisaran angka 50 persen secara stagnan (BPS, 2019). Pada tahun 2021, proporsi partisipasi angkatan kerja perempuan berapa pada angka 53,34% dibanding proporsi laki-laki yang mencapai angka 82,27%. Data tersebut mencakup 140,15 juta angkatan kerja di Indonesia, sehingga gap proporsi antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja masih mencapai angka yang tinggi yakni 28,93%. Hingga tahun 2023, TPAK perempuan hanya menyentuh angka 54,52% dan laki-laki kembali memimpin dalam angka 84,26% (BPS, 2023).

#### **d. Kepemimpinan Struktural**

Superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam dunia kerja, salah satunya dianalisis dalam hal kepemimpinan perempuan, yakni posisi perempuan untuk pengambilan keputusan (KPPPA, 2019). Pada tahun 2020 capaian Proporsi Perempuan yang Menduduki Posisi Manajerial Indonesia berada pada angka 33.08%, hingga tahun 2022, angka tersebut menurun pada angka 32.2% (BPS, 2022). Dalam bidang politik, diatur ketetapan kuota sebesar 30% bagi perempuan untuk duduk di kepengurusan partai politik dan lembaga DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten melalui UU Nomor 12 tahun 2003. Namun, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan tidak hanya sebatas perihal kuota, lebih dari itu,

diperlukan kesadaran untuk mendobrak hambatan partisipasi perempuan di ruang publik dengan mendorong keikutsertaan perempuan untuk terlibat aktif yakni dalam pembuatan keputusan dan kebijakan (Bintari, 2022). Kemudian dalam aspek birokrat, kesenjangan distribusi level jabatan tinggi di posisi eselon 1-5 lintas 34 kementerian, hanya terdapat sekitar 24% PNS perempuan yang menjadi pejabat eselon seiring perjalanan karirnya, jauh dibandingkan dengan laki-laki (Amalia, 2019).

#### e. Proporsi Upah

Perempuan rata-rata menghadapi keterbatasan akses terhadap sektor produktif jika dibandingkan dengan laki-laki, kondisi ini berujung pada kerentanan *bargaining power* dalam pendapatan atau upah. Selain itu, jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan umumnya diasosiasikan oleh masyarakat dengan pekerjaan tak berbayar dalam sektor domestik atau *unpaid work*, yang cenderung meningkatkan potensi diskriminasi (Kemenkeu, 2021). Pada tahun 2020 ditemukan bahwa pendapatan atau upah perempuan masih timpang yakni 23% lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada kondisi dengan kapasitas yang sama, perempuan umumnya akan mendapatkan upah 20-30% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (BAPPENAS, 2021).

#### f. Inklusifitas Sektor Pekerjaan

Data dari BPS akan Persentase Tenaga Kerja Formal berdasarkan Jenis Kelamin, menampilkan bahwa pada tahun 2021 terjadi kemunduran persentase tenaga kerja perempuan dalam sektor formal yang semula berada pada angka 36,20%, menurun menjadi 35,57% pada tahun 2022 (BPS, 2022). Bahkan jika dikaji berdasarkan sektor industri, subordinasi dalam relasi gender masih mengikat partisipasi perempuan dalam bidang ketenagakerjaan, yakni bidang-bidang yang masih minim digeluti oleh perempuan. Subordinasi menghambat partisipasi perempuan dalam jenis/bidang pekerjaan tertentu, seperti di bidang *Science, Technology, Engineering, Mathematic* atau STEM (BAPPENAS, 2021).

#### g. Stigma sosial

Ketimpangan gender terlihat dari masih berlangsungnya praktik subordinasi terhadap perempuan dalam pemenuhan hak mendasarnya, seperti hak cuti melahirkan dan haid yang masih sering dilanggar oleh perusahaan. Perempuan mengalami menstruasi dan mengambil cuti dinilai mengambat produktivitas yang menurunkan posisi tawar perempuan pekerja (Pramesti, Widiastuti, Yuliawati, 2021). Disparitas gender yang tercipta dalam dunia kerja menciptakan ketimpangan relasi kuasa, hal ini juga berimplikasi pada kerentanan perempuan dalam menghadapi diskriminasi, termasuk kekerasan seksual. Catatan Tahunan 2023 KPPPA, pada tahun 2022, ditemukan bahwa kekerasan yang berlangsung di tempat kerja menduduki posisi ketiga dalam daftar kekerasan yang terjadi di ranah publik yakni mencakup 155 kasus (Komnas Perempuan, 2023).

## 2. Urgensi Pelaksanaan Gender Mainstreaming di Indonesia

*Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender (UN ECOSOC, 1997). Proses melibatkan dan mengikutsertakan kepentingan yang berbasis gender dalam aktivitas, kebijakan atau program, merupakan pengertian akan *gender mainstreaming*. Secara konstitusi, amanat pengarusutamaan gender memang telah diinstruksikan melalui Inpres No.9 Tahun 2000. Namun, secara institusional, implementasi ini belum berjalan dengan maksimal untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Dalam laporan yang diinisiasi BAPPENAS dalam menilai pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000, yang menganalisis 18 Kementerian, 7 Provinsi, dan 7 Kabupaten/Kota terpilih, ditemukan bahwa implementasi pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi, masih belum terlaksana dengan baik (Kertati, 2022). Permasalahan terhambat karena pemahaman yang masih terbatas. Oleh karenanya, masih dibutuhkan upaya peningkatkan pemahaman gender aparatur negara sebagai pembuat kebijakan untuk dapat menerjemahkannya dalam implementasi *gender mainstreaming* yang dilakukan secara kelembagaan.

*Gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender menjadi strategi yang digunakan untuk meminimalisir kesenjangan gender dalam pembangunan. Sehingga, pembangunan manusia berbasis gender menjadi suatu urgensi untuk membentuk kehidupan masyarakat

tanpa diskriminasi, ketidakadilan, dan kekerasan untuk diimplementasikan. Disamping itu, hak yang setara antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu prinsip dasar untuk dipenuhi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahwa pemenuhan hak perempuan menjadi aspek penting pemenuhan hak asasi manusia, sehingga, upaya *gender mainstreaming* sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan gender menjadi suatu urgensi untuk dilaksanakan pemerintah. Hal ini juga berkaitan dengan peluang pertumbuhan ekonomi bagi negara yang mengedepankan kesetaraan gender. Menurut penelitian dari *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), penyelesaian permasalahan kesenjangan gender, melalui reformasi birokrasi, hukum, dan institusional bagi perempuan dapat berkontribusi dalam peningkatan GDP negara sebanyak 0,6% per tahun (OECD, 2023).

*Gender mainstreaming* sebagai strategi memberikan dorongan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari kelompok marjinal kedalam arus utama pengambilan keputusan, partisipasi, dan kepemimpinan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, fungsi, hingga struktur suatu institusi (UN Women, 2020). Beragam kebijakan atau regulasi yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan gender menggambarkan upaya yang meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan urgensi kesetaraan gender. Namun, pada kenyataannya, ketimpangan akses yang dimiliki laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik masih jauh timpang. Oleh karenanya, upaya aktor non-pemerintah, termasuk NGO, seperti Plan International memegang peranan penting untuk mendukung pemerintah mewujudkan agenda pembangunan terhadap aspek kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan.

### **3. *Non-governmental Organizations* (NGO) Plan International**

Plan International merupakan organisasi non-pemerintah yang berbasis *humanitarian and development* tingkat internasional yang memiliki pusat di United Kingdom. Sejarah dari Plan International bermula pada tahun 1937 sebagai suatu inisiatif individual seorang jurnalis asal Inggris yang bernama John Langdon Davies bersama dengan seorang pengungsi yang bernama Eric Muggeridge. Kedua inisiator tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak dari Perang Spanyol, karenanya diberi nama sebagai Foster Parents PLAN for Children in Spain. Perang yang berakhir pada tahun 1939, dilanjutkan dengan kerusakan pada Perang Dunia II. Kemudian, inisiatif tersebut dibentuk menjadi suatu struktur kelembagaan yang dinamai Foster Parents Plan for War Children, yang bergerak sebagai organisasi sejak tahun 1940-an. Selama Perang Dunia ke II, organisasi ini berkontribusi untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terdampak perang (Plan International, 2017). Kemudian, perjuangan juga berlanjut saat kondisi pasca perang, yakni untuk menemukan donors dalam mendukung pemulihan anak-anak korban perang. Gerakan yang dilakukan Davies dan Eric dilakukan secara bertahap menyasar ke negara-negara sekitar Eropa, bahkan hingga Amerika. Hingga saat perang berakhir, Foster Parents Plan for War Children berkembang, memberikan pengaruh tidak hanya dalam wilayah Eropa.

Perubahan ini juga beriringan dengan penggantian nama organisasi menjadi Foster Parents Plan Inc, sekitar tahun 1950-an. Perlahan dan bertahap Foster Parents Plan Inc kemudian memperluas jangkauannya menuju negara-negara regional Amerika, bahkan Asia (Plan USA, n.d.). Pada tahun 1970-an, Foster Parents Plan Inc mengganti namanya menjadi Plan International sebagai rujukan penjangkauan secara global. Pada tahun 1980-an, Plan International memasuki wilayah negara-negara di Asia seperti Jepang. Komitmen dan upaya yang dilakukan organisasi ini kemudian diakui oleh The Economic and Social Council of United Nations (ECOSOC) sekitar tahun 1990-an. Hingga kini, Plan International telah melakukan perluasan hingga ke-80 lebih negara di dunia, meneruskan misi dalam pemenuhan hak anak, dan kesetaraan terhadap anak perempuan (Plan International, 2017). Plan International merupakan organisasi independen non-pemerintah yang bergerak dalam aspek pembangunan dan kemanusiaan untuk memperjuangkan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan. Nilai yang menjadi komitmen yang dilakukan Plan International yakni, (1) *open and accountable*, (2) *strive for lasting impacts*, (3) *inclusive and empowering*, (4) *work well together*, dan (5) *leadership, people, and culture* (Plan International, 2023).

Plan International bekerja dalam tingkat global, regional, nasional, hingga lokal, demi memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap anak perempuan. Bekerja

bersama lebih dari 75 negara di dunia, Plan International mengupayakan ambisi nya yakni “*All Girls Standing Strong Creating Global Change*” melalui mekanisme “*locally led and globally connected*”(Plan International, 2015). Adapun komitmen Plan International dalam level global untuk menempatkan agenda pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap anak perempuan dilakukan dengan melibatkan organisasi internasional antar pemerintah, seperti United Nations (UN) (Plan International, 2014). Bersamaan dengan hal tersebut, Plan International memiliki strategi dalam rangka menuju tahun 2030, sebagai upaya untuk mencapai tujuan global tahun 2030 yakni SDGs. Hal tersebut dilakukan melalui kerangka *transformative programming and influencing*, dengan dimensi perubahan yang saling berkaitan yakni: mempengaruhi norma-norma sosial terkhusus dalam aspek gender yang berkaitan dengan perilaku dan sikap masyarakat, memperkuat individu dan masyarakat, serta jaring aman atau safety nets, dan berkontribusi untuk perbaikan kebijakan, legislasi, dan layanan pemerintah yang mempengaruhi hak anak dan kesetaraan anak perempuan (Plan International, 2021).

#### **a. NGO Plan International di Indonesia**

Sejarah Plan International di Indonesia berawal dari tahun 1969, dengan nama Foster Parents Plan Inc, bertepatan di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Foster Parents Plan Inc berupaya untuk memperluas jangkauannya ke seluruh dunia untuk memberikan bantuan pada anak-anak. Organisasi ini hadir di Indonesia melalui campur tangan Gubernur Yogyakarta yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk bekerjasama dalam hal perlindungan anak-anak terlantar. Oleh karenanya, organisasi ini awalnya beroperasi di Indonesia dengan pusat Yogyakarta untuk memberikan harapan hidup dan perkembangan bagi anak-anak. Hingga pada tahun 1970an, cakupan ruang kerja Plan International di Indonesia juga turut bertambah ke wilayah lainnya, seperti Bali pada tahun 1972, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1986, sampai Jawa Barat pada tahun 1997. Sebagai perwakilan Plan International di Indonesia, Plan Indonesia atau dikenal juga dengan Yayasan Plan International Indonesia memiliki kantor perwakilan yang berlokasi di Jakarta Selatan, yang berdiri sejak tahun 2005 (Plan Indonesia, n.d.). Membawa objektif dari Plan International, Plan Indonesia mengimplementasikan serangkaian kegiatan untuk mengupayakan pemberdayaan anak dan kaum muda, khususnya perempuan.

Berdasarkan wawancara dengan representasi dari Plan Indonesia ditemukan bahwa strategi Plan Indonesia untuk mendorong kegiatan dilakukan berbasis *transformative programming and influencing* sebagai afiliasi dari Plan International merupakan langkah-langkah yang mengacu pada strategi global dan potensi Indonesia dalam pemenuhan hak anak, yang mengedepankan kesetaraan anak perempuan di Indonesia. Nilai kesetaraan gender dan inklusi sosial atau *Gender Equality Social Inclusion* (GESI) menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari Plan Indonesia secara organisasional. Sehingga, untuk mengupayakan visi organisasi dan meraih tujuan global, Plan Indonesia menjadikan aspek kesetaraan gender dan hambatan yang dihadapi perempuan sebagai inti dari objektif kegiatan yang dilakukan, yang kemudian juga diterapkan secara internal (Gender Equality Social Inclusion Specialist, 2024). Melalui strategi *transformative programming and influencing*, Plan Indonesia juga berkontribusi dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Plan Indonesia, 2023). Hal ini membentuk framework yang menggambarkan relasi yang terbangun antara suatu NGO dan negara (Ahmed & Potter, 2006). Relasi yang terbangun antara negara dan Plan Indonesia memosisikan Plan Indonesia sebagai NGO kolaborator, yakni NGO yang bekerjasama dengan negara untuk mencapai objektif dari negara tersebut.

#### **b. Feminisme Liberal dalam Upaya Plan Indonesia**

Upaya Plan International untuk menggerakkan dunia melalui pendekatan yang transformatif gender dalam setiap kegiatannya mencerminkan konstruksi utama feminisme liberal yakni untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik dalam upaya mengatasi diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender lainnya. Plan Indonesia meyakini bahwa praktik diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan ketidaksetaraan gender lainnya, berakar pada kesulitan atau keterbatasan ruang gerak perempuan mengakses sektor publik (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024). Maka hal tersebut beriringan dengan perspektif feminisme liberal yang menilai bahwa akar permasalahan terletak pada ketimpangan dan penindasan hak perempuan untuk dapat

berdaya dan berkesempatan jika dibandingkan dengan laki-laki, yang seharusnya. Laki-laki dan perempuan sebagai individu yang rasional memiliki kemampuan untuk mengasah kapasitas intelektual dan moralitas sendiri (Wollstonecraft, 1975). Oleh karenanya, Plan International menilai bahwa untuk mencapai kesetaraan gender maka diperlukan upaya untuk mentransformasikan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang akan diaplikasikan melalui gender *transformative programming and influencing*, sebagai upaya memberdayakan perempuan. Kesetaraan gender kampanye Plan Indonesia yang berkeadilan gender dalam mengadopsi ide feminisme liberal.

Dalam upaya memastikan pemenuhan hak-hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan serta kaum muda perempuan, Plan Indonesia melalui kerangka *transformative programming* Plan International, mengimplementasikan 7 program tematik yang berkolaborasi dengan berbagai level, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Program tematik ini menjadi strategi nasional Plan Indonesia yang mengadopsi strategi global untuk lebih kontekstual merepresetasikan kebutuhan nasional dan lokal, sehingga menciptakan dampak yang nyata. 7 program tematik Plan Indonesia mencakup (Plan Indonesia, 2023): pencegahan stunting, sekolah tangguh, kesehatan remaja, kaum muda tangguh krisis iklim, penghapusan kekerasan pada anak dan kaum muda, ketenagakerjaan dan kewirausahaan kaum muda, kesiapsiagaan serta tanggap bencana responsif gender. Plan Indonesia menempatkan prioritas pada upaya mendorong kapasitas dan agensi perempuan melalui program-program nya. Adapun, hal ini berjalan beriringan dengan ide yang dibawa oleh feminisme liberal, bahwa perempuan harus diberikan hak politik, ekonomi, dan pendidikan yang sama dengan apa yang telah dinikmati laki-laki secara mendasar (Mill & Taylor, 1970).

Selain berbentuk program yang tematik, Plan Indonesia juga mengadopsi strategi global kedalam strategi nasional yang kontekstual dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia melalui pendekatan *transformative influencing*. Plan Indonesia meyakini bahwa akar permasalahan terletak pada kesenjangan akses perempuan dalam ruang publik yang didorong oleh konsep norma gender yang berlangsung di masyarakat sosial (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024). Girls Get Equal sebagai sebuah kampanye dapat dipahami sebagai gerakan global yang lahir dari inisiatif Plan International sebagai upaya untuk memastikan kesetaraan bagi anak dan kaum muda, terkhusus perempuan. Di Indonesia, melalui represetasi Plan International, kampanye Girls Get Equal diupayakan Plan Indonesia untuk dapat memberikan kebermanfaatn secara langsung dan memastikan kesetaraan bagi setidaknya 3 juta anak dan kaum muda perempuan hingga tahun 2027 (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024). Kampanye Girls Get Equal dimanifestasikan melalui berbagai proyek yang mencakup (Plan Indonesia, n.d): (1) Girls Take Over; proyek ini merupakan inisiatif Plan International yang ditujukan untuk menyerukan perubahan paradigma dalam upaya mengatasi stereotip gender yang secara praktik telah menghambat kemajuan kaum muda, khususnya perempuan. (2) Girls Leadership Program: proyek yang diwujudkan melalui mekanisme peningkatan kapasitas serta kepemimpinan anak dan kaum muda perempuan. (3) Girls Leadership Academy: proyek *flagship* yang memiliki objektif untuk peningkatan kapasitas anak dan kaum muda perempuan dalam aspek kepemimpinan. (4) Jelajah Timur. proyek dengan mekanisme penggalangan dana untuk pembangunan dan kesetaraan gender yang menargetkan pengadaan air bersih yang layak di Nusa Tenggara Timur.

#### **4. Gender Mainstreaming Plan Indonesia dalam Bidang Ketenagakerjaan melalui proyek Girls Take Over**

*Gender mainstreaming* sebagai strategi memberikan dorongan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari kelompok marjinal kedalam arus utama pengambilan keputusan, partisipasi, dan kepemimpinan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, fungsi, hingga struktur suatu institusi. Mekanisme *gender mainstreaming* mencapai kesetaraan gender dapat dianalisis berdasarkan beberapa aspek, yang mencakup *gender analysis, program design, resource allocation, program implementation, and monitoring & evaluation*. Kelima aspek tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai kebijakan, program, dan fungsi dalam suatu institusi (UN Women, 2022). Sebagaimana temuan dalam bagian sebelumnya,

bahwa dalam bidang ketenagakerjaan praktik subordinasi, marginalisasi, diskriminasi, dan bentuk ketidaksetaraan lainnya terjadi di Indonesia. Plan International sebagai entitas NGO melaksanakan mekanisme pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming* melalui pendekatan *gender transformative influencing* yang termanifestasi melalui kampanye Girls Get Equal.

Terkait dengan bidang ketenagakerjaan Girls Take Over menjadi salah satu langkah inisiatif dari Plan International dalam Kampanye Girls Get Equal. Dimana dalam hal ini, Girls Take Over merupakan gerakan afirmatif kepemimpinan perempuan dan representasi perempuan dalam ruang publik dengan mekanisme *role play*. Sejak tahun 2016, Girls Take Over secara global diselenggarakan di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pelaksanaan Girls Take Over dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah, perusahaan, media, bahkan organisasi untuk mentransformasikan gender dan konsep kepemimpinan yang patriarkis (Mariza, 2020). Melalui langkah dalam proyek Girls Take Over, Plan Indonesia bekerjasama dengan beragam institusi untuk menjadikan aspek gender dan kesetaraan gender sebagai *mainstream* dalam beragam inisiatif yang berkeadilan gender. Berikut adalah analisis aspek gender mainstreaming dalam kegiatan Plan Indonesia melalui Girls Take Over, sebagai berikut:

#### **a. Gender Analysis**

*Gender Analysis* merupakan tahapan dasar untuk mengidentifikasi suatu isu berimplikasi pada aspek gender dalam suatu konteks atau sektor, dan menemukan opsi untuk menangani permasalahan tersebut. Melalui tahapan gender analysis akan ditemukan permasalahan yang berbasis data untuk mendasari tercapainya transformasi gender. Kampanye sebagai bentuk dari *transformative influencing* Plan International, dibentuk mekanisme riset oleh nasional terhadap global dalam menemukan kondisi secara nyata yang akan dikonstruksikan untuk menjadi data, sehingga kegiatan yang terbentuk melalui riset dapat memberikan kebermanfaatannya yang nyata. Setiap tahun, Plan International bersama dengan representasinya secara regional, nasional, maupun lokal akan membentuk mekanisme penelitian yang mengungkapkan diskriminasi terhadap anak dan kaum muda perempuan di berbagai negara. Mekanisme tersebut dikenal dengan *State of the World's Girls Report* yang mendasari berjalannya kampanye Plan International, termasuk Girls Get Equal. Setiap tahun, laporan ini dilaksanakan untuk memastikan kampanye yang dilakukan berbasis pada kondisi nyata sehingga konteks yang diimplementasikan dapat memajukan agenda pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap kaum muda perempuan.

Tahapan *gender analysis* yang dilakukan Plan Indonesia dalam pelaksanaan programnya didasarkan pada penelitian berbasis gender *specific data collection* melalui State Of The Girls Report dan mekanisme penelitian lainnya. Pelaksanaan Girls Take Over pada tahun 2021 yang menjalin kerjasama dengan Kementerian BUMN didasarkan pada analisis berbasis gender, bahwa COVID-19 berdampak dalam peningkatan gap atau kesenjangan gender pada perempuan dalam bidang ketenagakerjaan baik sektor formal maupun informal. Plan Indonesia melihat bahwa pandemi yang mengubah banyak hal, juga berimplikasi terhadap pendapatan, hubungan kerja, hingga mekanisme kerja terhadap perempuan (Plan Indonesia, 2022). Kemudian, pada tahun 2022, Girls Take Over yang bekerjasama dengan KPPPA didasarkan pada analisis peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas anak dan kaum muda perempuan untuk dapat berkontribusi mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungannya (Plan Indonesia, 2023). Hingga pada tahun 2023, Plan Indonesia menjalin kerjasama dengan MRT Jakarta, yang didasarkan pada analisis urgensi kesetaraan dan kepemimpinan perempuan dalam sektor *Science, Technology, Engineering, and Math* atau STEM (Plan Indonesia, 2023). Dapat dianalisis melalui beragam tema yang di design, Plan Indonesia menempatkan objektif untuk mencapai agensi anak dan kaum muda perempuan yang menjadi manifestasi penggunaan *gender specific language* dalam upaya *gender mainstreamingnya*.

#### **b. Program Design**

Selanjutnya adalah aspek pembentukan program atau *program design*, yakni tahapan membentuk pola program mencakup prioritas isu dan kapasitas program. Plan International menginisiasikan kampanye Girls Get Equal untuk mencapai *equal freedom, equal representation, dan equal power*. Adapun mekanisme yang dapat dilakukan oleh entitas representasi Plan International, termasuk Plan Indonesia, dapat disesuaikan dengan konteks

sosial, ekonomi, dan politik negara. Plan Indonesia dalam kampanye Girls Get Equal membentuk mekanisme program yang mencakup proyek Girls Take Over. Pelaksanaan Girls Take Over menjadi salah satu rangkaian kegiatan dari perayaan Hari Anak Internasional atau *International Day of The Girls* (IDG) setiap tahun. Proyek Girls Take over dilaksanakan dengan mekanisme Take Over kepemimpinan strategis instansi yang dituju. Kegiatan diawali dengan tahapan seleksi untuk menemukan representasi anak dan kaum muda perempuan yang akan menjadi partisipan secara langsung. Proses seleksi dilakukan dengan mekanisme tes tertulis untuk menjangkau peserta dalam jumlah yang semakin kecil. Kemudian, akan dilaksanakan Girls Leadership Class sebagai tahapan pembekalan kapasitas bagi calon finalis, dilanjutkan dengan seleksi finalis melalui mekanisme kompetisi, hingga terpilih partisipan yang akan merepresentasikan anak dan kaum muda perempuan dalam pelaksanaan Girls Take Over (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024).

### c. *Resource Allocation*

Aspek *resource allocation* merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa program dapat dialokasikan untuk kesetaraan gender. Dalam hal ini, Plan Indonesia mengakses sumber daya organisasi melalui sumber dana sponsor dan dana bantuan. Sumber dana sponsor menjadi sumber pendanaan yang krusial bagi Plan International sebagai upaya untuk menjadi jembatan penghubung antara sponsor dengan anak penerima dana sponsor. Pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap anak perempuan menjadi visi dari Plan International, sehingga segala upaya pendanaan dari sponsor akan diimplementasikan untuk mencapai visi tersebut. Sebagai sikap integritas dan transparansi, Plan Indonesia akan menyertakan laporan secara rutin yang akan dilaporkan pada sponsor untuk memperkuat kepercayaan. Begitu pula dengan dana bantuan, yakni Berbagai bentuk bantuan di berbagai macam, bisa berupa suatu kerjasama ataupun bantuan materil. Dana bantuan ini berasal dari suatu negara, institusi atau perusahaan yang berkomitmen mewujudkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan terhadap anak perempuan bersama dengan Plan Indonesia (Bari, 2022).

### d. *Program Implementation*

Hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan Plan Indonesia, yakni *person in charge* dalam pelaksanaan Kampanye Girls Get Equal, ditemukan bahwa kampanye diimplementasikan melalui serangkaian program yang memiliki objektif dalam ranah *equal freedom, equal representation, dan equal power*. Implementasi kampanye tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan Girls Take Over pada tahun 2021, Plan Indonesia melaksanakan program Girls Take Over bekerja sama dengan sektor pemerintahan yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah strategis ini diinisiasi oleh Plan Indonesia dalam berkolaborasi dengan Kementerian BUMN untuk berdiri bersama dalam pemenuhan hak anak dan anak perempuan (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024). Mewujudkan kesetaraan gender menjadi inisiatif dasar dari kolaborasi antara Plan Indonesia dan BUMN untuk berkomitmen dalam program yang sensitif gender. Melalui inisiatif ini, representasi dari anak dan kaum muda perempuan berkesempatan untuk memberikan opini atau masukan melalui teknis *role play* kepada jajaran pemimpin perusahaan BUMN dan Menteri BUMN sendiri. Kegiatan ini mentransformasikan isu gender melalui dampak yang didapatkan yakni kerjasama Kementerian BUMN, Forum Human Capital Indonesia, dan Srikandi BUMN untuk memberi dampak pada kesetaraan dalam bidang ketenagakerjaan hingga tahun 2026 dengan Plan Indonesia (Plan Indonesia, 2022). Isu yang dibawa oleh peserta terpilih merupakan aspek krusial dalam dinamika kesetaraan gender yang berkaitan dengan cuti hamil dan melahirkan, hingga stigma sosial lainnya yang membutuhkan transformasi norma dimana perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata.

Begitu pula pada tahun 2022, dimana Plan Indonesia kembali menggelar Kampanye Sehari Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SJMPPPA). Mengambil momentum pengesahan UU TPKS, Kampanye SJMPPPA ini mengambil tema Anak Indonesia Terlindungi Dari Segala Bentuk Kekerasan Seksual. Kegiatan ini didasarkan pada tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia melalui CATAHU KPPPA, sehingga upaya untuk mengkampanyekan pembebasan dari kekerasan seksual menjadi gerakan yang signifikan. Pelaksanaan Girls Take Over dalam tema Sehari Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dilaksanakan dengan memberikan

peningkatan kapasitas terhadap anak dan kaum muda perempuan terkait data dan fakta dalam melawan kekerasan seksual (Plan Indonesia, 2023). Hingga tahun 2023, Plan Indonesia menjalankan kerjasama dengan PT MRT Indonesia yang mengkampanyekan ruang aman dan partisipasi bermakna kaum muda perempuan dalam bidang *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM). Sebelumnya, peserta take over terpilih akan diberikan pembekalan peningkatan kapasitas berkaitan dengan gender equality dan social inclusion. Lalu, melalui kesempatan ini, representasi kaum muda perempuan berkesempatan untuk memberikan pandangannya melalui praktik role play Direktur Utama dan Direktur PT MRT Jakarta. Dalam pertemuan dengan Direktur Utama dan Direktur Konstruksi MRT Jakarta, peserta terpilih menyampaikan gagasannya berkaitan dengan peningkatan komitmen kesetaraan gender di lingkungan MRT (Plan Indonesia, 2023). Mekanisme Girls Take Over diimplementasikan dengan memperkuat kapasitas anak dan kaum muda perempuan terpilih, untuk dapat melakukan tindakan take over posisi kepemimpinan dalam level pemerintahan, perusahaan, media, dan peran-peran lainnya yang menyentuh aspek gender. Melalui implementasi *role play*, Girls Take Over memberikan kesempatan dan ruang bagi anak dan kaum muda perempuan menggagas ide yang dibawa untuk dapat menjadi pertimbangan dalam kegiatan kerja mitra kolaborasi kegiatan.

#### **e. Monitoring & Evaluation**

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas pencapaian sasaran program kerja. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang organisasi upayakan. Ditemukan melalui proses wawancara bawa Plan Indonesia melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan pada kampanye Girls Get Equal yang akan dimuat secara publik melalui laporan tahunan per tahun fiskal. Laporan tahunan akan berisikan capaian proyek, jangkauan kampanye, kontribusi terhadap SDGs, dan dampak kerja Plan Indonesia. Laporan yang dilaksanakan oleh Plan Indonesia juga akan dilaporkan secara regional yang akan berkontribusi pada data pencapaian Plan International secara global. Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi salah satu dari tahapan gender mainstreaming untuk memastikan aspek gender yang dijadikan pertimbangan mendasar dalam suatu kegiatan memiliki dampak yang nyata. Kampanye Girls Get Equal telah berhasil mengukuhkan 200 komitmen dari para pemegang kekuasaan untuk mendukung kepemimpinan anak perempuan dan aktivisme kaum muda (Gender Equality Social Inclusion Specialist Plan Indonesia, 2024).

Laporan pelaksanaan proyek Girls Take Over pada tahun 2021 yang berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN, memuat dampak yang didapatkan melalui kegiatan ini, dalam testimoni Menteri BUMN yakni Erick Thohir bahwa kegiatan yang dilaksanakan meningkatkan pemahaman beliau mengenai kepemimpinan perempuan yang memotivasinya untuk berkontribusi dalam mendorong kesetaraan kepemimpinan perempuan di BUMN. Begitu pula dengan Direktur Utama Bank Mandiri terkait kontribusi bermakna perempuan dalam bidang ketenagakerjaan. Melalui kegiatan ini pula, evaluasi yang dilakukan juga berkaitan dengan tindak lanjut kesepakatan setelah kegiatan yang berlangsung, dimana terjalin kerjasama yang lebih dalam antara Plan Indonesia dengan Kementerian BUMN dan beberapa perusahaan BUMN. Tindak lanjut dari kerjasama ini berimplikasi pada terbentuknya rencana kerja konkrit dalam MoU antara Plan Indonesia dan Kementerian BUMN hingga 5 tahun, termasuk penyediaan beasiswa pendidikan, peningkatan kapasitas gender bagi perusahaan BUMN melalui Girls Leadership Academy, dan beragam kerjasama lanjutan lainnya (Campaign Lead Plan Indonesia, 2024).

Jika dianalisis dengan konsep *gender mainstreaming* dalam perspektif feminisme liberal yang bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan mengadvokasikan transformasi regulasi berbasis gender, maka hal ini dapat dilihat dari kebijakan Perjanjian Kinerja Kementerian BUMN untuk mencapai target keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan BUMN hingga mencapai angka 25% hingga tahun 2023. Kerjasama yang terlaksana antara Kementerian BUMN dengan Plan Indonesia menjadi langkah transformasi dalam komitmen mendorong implementasi kebijakan peningkatan kepemimpinan perempuan di BUMN. Dimuat dalam Laporan Kementerian BUMN tahun 2022, rasio kepemimpinan perempuan dalam direksi BUMN adalah 10%, bersamaan dengan

komitmen advokasi Plan Indonesia dalam kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan yang turut serta berpengaruh terhadap realisasi peningkatan rasio keterwakilan perempuan hingga mencapai 15% (Kementerian BUMN, 2022). Begitupula dengan pelaksanaan Girls Take Over pada tahun 2022, dimana representasi anak dan kaum muda perempuan memiliki kesempatan untuk beropini mengenai urgensi perlindungan, pencegahan, serta penanganan kekerasan seksual dalam rangka pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada Mei 2022 (Plan Indonesia, 2022). Hingga tahun 2023, upaya transformasi gender yang terlaksana melalui kerjasama Girls Take Over dengan MRT Jakarta. Pada tahun 2023, 25 dari 30% karyawan perempuan di MRT Jakarta menduduki bagian *engineering*. Namun, hanya 2 dari 5 direksi MRT Jakarta yang direpresentasikan oleh perempuan. Oleh karenanya, melalui kerjasama ini, upaya untuk mendorong lebih banyak kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam bidang STEM diadvokasikan (Plan Indonesia, 2023).

Upaya gender mainstreaming Plan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan melalui proyek Girls Take Over dalam Kampanye Girls Get Equal di Indonesia. Sebagaimana menjadi mekanisme yang diinstruksikan oleh Plan International, Plan Indonesia mengimplementasikan seluruh kegiatannya dalam upaya untuk mencapai *transformative gender*. Dalam bidang ketenagakerjaan, Kampanye Girls Get Equal diupayakan untuk mentransformasikan nilai-nilai dalam norma gender yang menempatkan perempuan dalam posisi setara dan berdaya, Upaya tersebut dilaksanakan dengan mengkampanyekan *equal freedom, equal representation, dan equal power* dalam proyek-proyek kampanye Girls Get Equal, terutama Girls Take Over. Kontribusi Plan Indonesia dalam *gender mainstreaming* bidang ketenagakerjaan di Indonesia mencakup komitmen mengatasi akar permasalahan yang berdampak pada regulasi, pendidikan, TPAK, kepemimpinan perempuan, kesetaraan upah, inklusifitas sektor pekerjaan, hingga stigma yang menjadi beban bagi perempuan. Pendekatan *transformative influencing* yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dalam level pemerintahan, secara langsung maupun tidak langsung, menjawab permasalahan kepincangan upaya pemerintah dalam agenda pengarusutamaan gender atau *gender mainstreaming*.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun aspek kesetaraan gender telah salah satu pertimbangan penting dalam agenda pembangunan di Indonesia, kesenjangan berbasis gender yang menampilkan kondisi subordinasi, diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan masih terjadi. Payung hukum yang mendasari dinamika kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan pada kenyataannya masih belum efisien dalam memberikan keadilan dan kesetaraan berbasis gender. Kondisi ini dimanifestasikan melalui kesenjangan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan akses akan pendidikan, kesetaraan TPAK, proporsi upah, kepemimpinan, dan inklusifitas sektor pekerjaan. Bahkan, hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang ketenagakerjaan tergambar melalui stigma dan perlindungan kerja yang masih minim.

*Gender mainstreaming* menjadi dasar yang diamanatkan melalui kebijakan pemerintah sebagai dasar pembangunan yang berprespektif gender. Sehingga, keseluruhan aktivitas yang dilakukan lembaga negara harus mengintegrasikan aspek gender sebagai salah satu pertimbangan yang krusial. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan *gender mainstreaming* oleh lembaga pemerintah masih belum merata. Oleh karenanya, upaya aktor non-pemerintah, termasuk NGO, seperti Plan International memegang peranan penting untuk mendukung pemerintah mewujudkan agenda pembangunan terhadap aspek kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam upayanya, ditemukan bahwa Plan International menerapkan nilai-nilai feminisme liberal yang termanifestasi melalui kegiatannya dengan pendekatan *transformative programming dan influencing*.

Dapat disimpulkan bahwa Plan International melalui representasinya yakni Plan Indonesia berkedudukan sebagai NGO kolaborator yang turut mendukung pencapaian atau objektif dari pencapaian pembangunan di Indonesia. *Gender mainstreaming* oleh Plan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan melalui Proyek Girls Take Over dalam kampanye Girls Get Equal dilaksanakan melalui tahapan *gender analysis, program design, resource allocation, program*

*implementation, and monitoring & evaluation.* Tahapan yang terlaksana berlandaskan prinsip *gender transformative* dalam upaya mengadvokasikan transformasi dalam institusi yang menjadi kolaborator dari Plan Indonesia melalui proyek Girls Take Over seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga MRT Jakarta.

## E. Referensi

- Ackerly, B., Stern, M., & True, J. (2006). *Feminist Methodologies for International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ahmed, S., & Potter. D. M. (2006). *NGOs in International Politics*. Kumarian Press, Inc.
- Amalia, S. (2019). *Hanya 23% Perempuan Duduki Jabatan Eselon*. <https://magdalene.co/story/Hanya-23-Persen-Perempuan-Duduki-Jabatan-Eselon>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Narasi Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals Tahun 2021-2024*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Persentase Tenaga Kerja Formal berdasarkan Jenis Kelamin*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). *Proporsi Perempuan yang Menduduki Posisi Manajerial Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Rata-rata Lama Sekolah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia*.
- Bari, M. G. (2022). *Peran Plan Indonesia untuk Mencapai Kesetaraan Gender di Dunia Kerja*. Repository Universitas Kristen Indonesia.
- Betsill, M., & Corell, E. (2008). *NGO Diplomacy. The Influence of Non Governmental Organizations in International Environmental Negotiations*. Massachusetts Institute of Technology.
- Campaign Lead Plan Indonesia. (2024). *Wawancara oleh Esmeralda Putri Namora. Upaya Gender Mainstreaming Plan International dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia Melalui Kampanye Girls Get Equal (28 May 2024)*
- Gender Equality Social Inclusion Specialist Plan Indonesia. (2024). *Wawancara oleh Esmeralda Putri Namora. Upaya Gender Mainstreaming Plan International dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia Melalui Kampanye Girls Get Equal (1 Juni 2024)*.
- Gerson, G. (2002). *Liberal Feminism: Individuality and Oppositions in Wollstonecraft and Mill*. *Political Studies*, 50 (2), 794-810.
- ILO. (2006). *Konvensi-Konvensi Ilo tentang kesetaraan gender di dunia kerja*.
- Irmadillah. N. (2022). *Kontribusi Human Initiative pada Program Initiative for Empowerment dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)*. UIN Jakarta.
- Kementerian BUMN. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Kajian Pengarusutamaan Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Laporan Beijing Platform for Action (BPFA) +25 Indonesia untuk tahun 2014-2019*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data BPS TPAK Nasional berdasarkan Jenis Kelamin 2021-2023*.
- Kertati, I. (2022). *Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah*. *Jurnal Media Administrasi*. 7 (1). 1-7.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*.
- Lewis, D. (2019). *Non-Governmental Organizations and Development*. 1st Edition. London: Routledge.
- Mariza, N. (2020). *Anak Perempuan Menggapai Mimpi menjadi Pemimpin: Studi Kasus Program 'Girls Tke Over' di Indonesia*. *Jurnal Perempuan*, 25(2), 89-100.
- Maryam, R., (2012). *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 2012.
- McKinsey&Company. (2018). *The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Asia Pacific*.

- Mehrotra, S., & Sinha, S. (2017). Explaining falling female employment during a high growth period. *Economic and Political Weekly*, 52(39), 54–62. 2017.
- Mill, J. S., & Taylor, H. (1970). *Essays on Sex Equality*. Chicago: University of Chicago Press.
- OECD. (2023). Promoting Gender Equality to Strengthen Economic Growth and Resilience. [https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/promoting-gender-equality-to-strengthen-economic-growth-and-resilience\\_5bd62a5b.html](https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/promoting-gender-equality-to-strengthen-economic-growth-and-resilience_5bd62a5b.html)
- Plan Indonesia. (2021). Laporan Tahun Fiskal 2021. Periode Juni 2020 – Juli 2021.
- Plan Indonesia. (2022). Laporan Tahun Fiskal 2022, Periode Juli 2021 – Juni 2022.
- Plan Indonesia. (2023). *Ambil Alih Posisi Dirut MRT Jakarta Selama Sehari, Perempuan Muda Serukan Pentingnya Ruang Aman dan Nyaman di Transportasi Publik*. <https://plan-international.or.id/id/siaran-pers/134446/>
- Plan Indonesia. (2023). Laporan Tahun Fiskal 2023. Periode Juni 2022 - Juli 2023.
- Plan Indonesia. (n.d.). Profil Organisasi. <https://plan-international.or.id/id/profil-organisasi/>
- Plan International USA. (n.d.). Our History. <https://www.planusa.org/about-us/history/>
- Plan International. (2014). Submission To The Report of UN Secretary-General on Progress Towards Ending Child, Early and Forced Marriage World Wide.
- Plan International. (2015). ONE PLAN Rights and Opportunity for Every Child One Goal Plan's Strategy to 2015.
- Plan International. (2017). Our History. [www.plan-international.org/organisation/history](http://www.plan-international.org/organisation/history)
- Plan International. (2021). Living Up To Our Commitment: Gender Transformative Programming and Influencing During Covid-19.
- Plan International. (2023). Global Policy.
- Pramesti, D. A., Widiastuti, W., & Yuliawati, F. (2021). Peran Negara dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1 (7).
- Shepherd, L. J. (2010). Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations. *Gender & Development*, 8(23).
- Smith, S. (2018). Introducing Feminism in International Relations Theory. <https://www.e-ir.info/pdf/72236>.
- Tickener, J. (1992). *Gender in International Relations: Feminist Approaches to Achieving Global Security*. New York: Columbia University Press.
- UN WOMEN. (2020). Gender Mainstreaming: A Global Strategy for Achieving Gender Equality & The Empowerment of Women and Girls.
- UN WOMEN. (2022). Handbook on Gender Mainstreaming for Gender Equality Results..
- United Nations. (1997). Coordination Segment of The Policies and Activities of The Specialized Agencies and Other Bodies of The United Nations System.
- Wolf, N. (1997). *Gegar Gender: Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*. Pustaka Semesta Press.
- Wollstonecraft, M. (1975). *A Vindication of the Rights of Women*. New York: W.W. Norton.
- World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021.